

MANTAN KABID PERTAMANAN DI PERIKSA LAGI

● **Dugaan Korupsi Dana Pemeliharaan Taman**

SEMARANG - Mantan Kepala Bidang Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang, Sujadi, kembali menjalani pemeriksaan polisi terkait dugaan korupsi dana perawatan sejumlah taman yang bersumber dari APBD Semarang tahun 2012.

Saat ini status Sujadi masih sebagai saksi dan telah menjalani pemeriksaan tambahan sebanyak dua kali. Dalam waktu dekat

Sujadi akan diperiksa kembali terkait anggaran yang diduga dikorupsi.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang, AKBP Wika Hardianto mengatakan, dugaan korupsi mencuat karena anggaran perawatan taman pada 2012 dipecah menjadi beberapa bagian. Padahal, sesuai aturan anggaran harus direalisasikan dengan cara lelang. Prosedur itu, kata Wika,

sudah menyalahi aturan, karena pada gilirannya Sujadi menunjuk rekanan secara langsung untuk mengerjakan perawatan taman.

"Perawatan taman seharusnya dilelang dulu, ini malah anggaran dipecah-pecah kemudian langsung menunjuk rekanan untuk merawat taman," katanya, Senin (16/6).

Pada Oktober 2013, Sujadi menjalani pemeriksaan perdana untuk meminta keterangan terkait dugaan korupsi belanja sarana prasarana taman oleh

DKP sebesar Rp 744 juta pada APBD Semarang 2012. Dalam pemeriksaan pertanggungjawaban belanja, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tidak menemukan bukti belanja.

Bantah Korupsi

Namun BPK menemukan nota kuitansi pemeliharaan sarana taman kota Rp 418.003.202 yang disimpan Sujadi. Dari hasil pengembangan penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polrestabes Semarang ditemukan paket pengerjaan lebih

besar dari dugaan sebelumnya dengan anggaran mencapai Rp 1,8 miliar.

Sujadi yang saat ini menjabat Kabid Peternakan pada Dinas Pertanian Kota Semarang menampik penyelidikan polisi dan temuan kuitansi oleh BPK.

Menurutnya, dana pemeliharaan taman tidak dapat dilelang, karena akan memakan waktu lama. Padahal, kebutuhan perawatan sepanjang bulan selama 2012.

"Kebutuhan perawatan taman

itu mendesak. Kalau dilelang ya lama. Bukan saya sengaja memecah anggaran, tapi memang harus dipecah begitu," ujarnya.

Terkait temuan kuitansi oleh BPK, Sujadi mengatakan, itu sifatnya insidental atau dananya tidak ada di anggaran. Kuitansi dibuat untuk menutup kebutuhan dalam jangka pendek dan mendesak.

"Karena keperluannya mendadak, jadi perlu langkah cepat untuk membelinya," ungkapnya. (H74,K44-39)